

**ASLI**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA</b>	
<b>HARI</b>	: Kamis
<b>TANGGAL</b>	: 23 Mei 2019
<b>JAM</b>	: 23.31

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**  
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbhpusat.pdip@gmail.com  
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbhpusat.pdip@gmail.com  
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan :

DPR

1. Sumatera Barat 1;
2. Papua;
3. Jawa Tengah 6;
4. Jawa Barat 7;
5. Sumatera Selatan 1;
6. Sulawesi Barat

DPRD Provinsi

1. Sumatera Selatan 9;
2. Sulawesi Selatan 4;
3. Papua 5

DPRD Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Simalungun Dapil 5;
2. Kabupaten Padang Sidempuan Dapil 3;
3. Kabupaten Dairi Dapil 3;
4. Kabupaten Samosir Dapil 1;
5. Kabupaten Bengkalis Dapil 4;
6. Kabupaten Bengkalis Dapil 5;
7. Kabupaten Siak Dapil 4;
8. Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4;
9. Kabupaten Bintan Dapil 3;
10. Kota Jambi Dapil 5;
11. Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1;
12. Kota Tangerang Selatan Dapil 1;
13. Kabupaten Bangkalan Dapil 3;
14. Kabupaten Trenggalek Dapil 1;
15. Kabupaten Dompu Dapil 3;
16. Kabupaten Pohuwato Dapil 1;
17. Kabupaten Toraja Utara Dapil 3;
18. Kabupaten Sigi Dapil 5;
19. Kabupaten Donggala Dapil 2;
20. Kabupaten Buru Dapil 1;
21. Kabupaten Buru Dapil 2;
22. Kota Manado Dapil 4;
23. Kabupaten Konawe;
24. Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
25. Kabupaten Membramo Tengah Dapil 4;
26. Kabupaten Puncak Dapil 3;
27. Kota Jayapura Dapil 2;
28. Kota Jayapura Dapil 4;
29. Kabupaten Manokwari Dapil 3;
30. Kabupaten Fakfak Dapil 2;
31. Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2;
32. Kabupaten Tambrauow Dapil 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
11. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
12. BUDI SETIAWAN, S.H.
13. FERNANDY RUSDI, S.H.
14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
18. ARIES SURYA, S.H.
19. ALVON K. PALMA, S.H.
20. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
22. RIZKA, S.H.
23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
24. M. IBNU, S.H.
25. SAMUEL DAVID, S.H.
26. DIPRANTO TOBOK PAKFAHAN, S.H.
27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
28. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si.
29. FARIDA HANUM, S.H.
30. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
31. OCTIANUS, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
39. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
40. ANDI WALINGA, SH.
41. MEGAWATY, SH.
42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH.
43. JELLIJ F.B. DONDOKAMBAY, S.H.
44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
48. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M.
50. HAKIM YUNIZAR, S.H.
51. MAHENDRA, S.H., M.Hum.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Bukti P-1), sebagai berikut :



## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

14	DEMOKRAT	321	9
19	PBB	1.462	5
20	PKPI	4	16
<b>TOTAL</b>		<b>21.627</b>	

8. Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum jika Mahkamah menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dimana terdapat keadaan **Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan** yang dilakukan oleh **NASRUDIN** dan **JABAL NUR**, sehingga cukup beralasan hukum jika dilaksanakan Pemungutan Suara Uiang pada TPS tersebut.

### S. PROVINSI PAPUA

#### 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

##### 1.1. DAPIL PAPUA

Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan jumlah perolehan suara menurut pemohon pada 5 Kabupaten di Provinsi Papua, yaitu:

No	Kabupaten	Perolehan suara menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih
1	Pegunungan Bintang	22.496	6.599	15.897
2	Nabire	88.763	13.780	74.983
3	Dogiyai	50.490	8688	41.802
4	Intan Jaya	50.675	0	50.675
5	Tolikara	23.274	0	23.274
6	Yahokimo	42.130	0	42.130
	<b>JUMLAH</b>			<b>248.761</b>

1. Bahwa perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan termohon disebabkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dengan merubah perolehan suara pemohon pada dokumen DB1, dimana perolehan suara pemohon pada dokumen yang ada pada DB.1 berbeda dengan perolehan suara pemohon pada dokumen DA1.
2. Bahwa akibat tindakan termohon yang merubah perolehan suara pemohon sebagaimana disebut pada point 1.2. diatas, pemohon kehilangan suara sebanyak 248.761 suara.
3. Bahwa menurut pemohon total keseluruhan suara pemohon pada dapil papua setelah ditambahkan dengan perolehan suara yang telah dihilangkan oleh termohon adalah sebanyak 617.279 suara

#### 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

##### 2.1. DAPIL PAPUA 5

1. Bahwa Pemohon atas nama **HENGKI BAYAGE, S.AP** dari PDI Perjuangan Caleg DPRD Nomor Urut 6 Dapil V Kabupaten Yahukimo, berdasarkan penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik **OBIO** yang dituangkan dalam DA1-DPRD



memperoleh suara bulat sebanyak 6.353 suara dari jumlah pengguna Hak Pilih 6.353, sedangkan untuk suara partai lainnya tidak memperoleh suara.

2. Bahwa Pemohon atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP dari PDI Perjuangan Caleg DPRD Nomor Urut 6 Dapil V Kabupaten Yahukimo, berdasarkan penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik **WERIMA** yang dituangkan dalam DA1-DPRD memperoleh suara bulat sebanyak 5.775 suara dari jumlah pengguna Hak Pilih 5.775, sedangkan untuk suara partai lainnya tidak memperoleh suara.
3. Bahwa Pemohon atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP dari PDI Perjuangan Caleg DPRD Nomor Urut 6 Dapil V Kabupaten Yahukimo, berdasarkan penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik **HOGIO** yang dituangkan dalam DA1-DPRD memperoleh suara sebanyak 2.285 suara sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 796 suara dan Partai HANURA memperoleh 274 suara dari jumlah pengguna Hak Pilih 3.355, sedangkan untuk suara partai lainnya tidak memperoleh suara.
4. Bahwa hasil penetapan DA1- DPRD yang telah ditetapkan pada ketiga Distrik tersebut Pemohon memperoleh suara sebanyak 14.413 suara, akan tetapi setelah dilakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang dituangkan kedalam DB1- DPRD Kabupaten YAHUKIMO, perolehan suara Pemohon HENGKI BAYAGE, S.AP dari PDI Perjuangan dihilangkan atau dialihkan oleh Penyelenggara (KPU Kab. YAHUKIMO) :
  - a. Distrik HOGIO suara pemohon sebanyak 2.285 suara dialihkan kepartai PAN dan HANURA.
  - b. Distrik WERIMA suara pemohon dialihkan kepartai NASDEM sebanyak 5.775 suara.
  - c. Distrik OBIO suara pemohon dialihkan kepartai DEMOKRAT sebanyak 6.353 suara.
5. Bahwa Pemohon atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP dari PDI Perjuangan Caleg DPRD Nomor Urut 6 Dapil V Kabupaten Yahukimo, berdasarkan penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi yang dituangkan dalam DC1-DPRD memperoleh suara sebanyak 12.187 dan jika dijumlahkan dengan suara hilang pemohon maka jumlah total suara pemohon adalah 26.600 suara.

### 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### 3.1. KOTA JAYAPURA DAPIL 4

1. Bahwa Pemohon menolak hasil Pleno Perolehan suara tingkat distrik Heram, dengan alasan:
  - Bahwa diketahui Daftar pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) pada distrik heram untuk pemilihan calon anggota DPRD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb, dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang, sedangkan surat suara yang diterima oleh PPD saat selesai pemilihan yaitu 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 49254 (buktinya DA1 DPRD kab/kota)
  - Bahwa sebelumnya ketika proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat distrik heram pada tanggal 7 Mei 2019, PPD heram telah melakukan kesalahan input sebab Tidak model DAA1 sebagai bahan sertifikasi untuk dilakukan perbaikan dengan melakukan peyandingan data
  - Bahwa terhadap kesalahan tersebut maka PDI menolak hasil yang dibacakan oleh PPD Heram.



- Bahwa PDIP menolak segala proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Heram karena prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku
- 2. Bahwa Pemohon menolak hasil Pleno Perolehan suara tingkat distrik Heram, dengan alasan:
  - Pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik jayapura utara terdapat keberatan saksi untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura pada keluarahan gurabesi terdapat perubahan-perubahan pada C1 Plano yang sudah diberi tanda silang yang dicurigai telah di rubah
  - Pada saat rekapitulasi di tingkat distrik jayapura utara, saksi tidak pernah diberikan model DAA1 sebagai sertifikasi pleno tingkat distrik
  - Bahwa Ketua PPD Jayapura Utara atas nama Palenge Andi Nyompa diduga mempunyai hubungan keluarga secara langsung dengan caleg DPRD Kota Jayapura dari Partai Golkar dengan nomor urut 7 atas nama Oktovina nasatekai, S.Sos. (ibu kandung dari Ketua PPD Jayapura Utara)
  - Bahwa Anggota PPD Jayapura Utara atas nama Irfan diduga mempunyai hubungan keluarga secara langsung dengan caleg DPRD Kota Jayapura dari Partai Golkar dengan nomor urut 9 atas nama Korlin Laehe. (ibu kandung dari Anggota PPD atas nama Irfan)
  - Saat perekapan di distrik jayapura utara khusus TPS. 10, 37, 38 kelurahan tanjung ria terdapat kejanggalan pada C1 Plano yang dicurigai sudah diubah-ubah karena terdapat banyak coretan pada C1 Plano nya

### 3.2. KOTA JAYAPURA DAPIL 2

- 3. Bahwa Partai Pemohon menolak secara keseluruhan Pleno Perekapan Hasil Pemilihan di Tingkat Distrik Abepura dengan dasar:

- Perubahan DA 1-..., sebanyak 2 kali dan perubahan DB 1 sebanyak 3

Serifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Distrik (DA.1)	Total keseluruhan suara Partai
DA1 Suara dasar sebelum terjadi perubahan hasil suara partai	10640
DA1 Perubahan 2 s/d perubahan ke-5	9223

- Bahwa saat rekapitulasi perhitungan suara di Distrik Abepura, PPD Distrik Abepura tidak memberikan salinan Model DAA1 DPRD Kabupaten Kota yang menjadi dasar perhitungan suara di setiap TPS perkelurahan
- Bahwa terjadi pengelembungan suara pada partai PAN sebesar 414 Suara. Dimana suara dasar partai PAN adalah 3000 suara di rubah menjadi 3414 suara (Bukti DAA 1 dan DA1 DPRD Kabupaten/kota)
- Bahwa ketika dilakukan pleno perekapan oleh KPU Kota Jayapura, DA 1 yang digunakan sebagai rujukan DB1 adalah Da1 Perubahan ke 2, 3, 4 dan 5 Perubahan bukannya DA1 Pertama. Sehingga suara partai yang digunakan adalah sejumlah 9223
- Bahwa akibat perubahan itu mengakibatkan 1 kouta kursi PDIP di DPRD di Distrik Abepura berkurang
- Bahwa terhadap Jumlah Kursi PDIP di Distrik Abepura yang berkurang 1 Kursi tersebut , saksi PDIP telah mengajukan Keberatan kepada KPUD Kota Jayapura (model DB2) pada tanggal 20 mei 2019



- Adanya surat Pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada tingkat distrik abepura yang diterbitkan oleh Bawaslu Kota Jayapura Nomor; 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, yang ditujukan kepada KPUD Kota Jayapura, tanggal 16 Mei 2019

#### 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

##### 4.1. KABUPATEN PUNCAK DAPIL 3

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	741	3.878

Keterangan :

- Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Yugumuak sebanyak 1.443 suara
- Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Sinak sebanyak 634 suara;
- Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Lambewi sebanyak 400 suara;
- Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Onery sebanyak 304 suara;
- Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Agandugume sebanyak 356 suara

##### 4.2. KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH DAPIL 4

Bahwa Pemohon adalah Caleg dan Perolehan Suara untuk Pemohon di Distrik Kelila adalah 1.010 suara berdasarkan Model C1. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 960 suara. Suara Pemohon berkurang sebanyak 50 suara. Bahwa berdasarkan hasil pleno yang dibuat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah di Desa Dambunggen tertulis 75 suara untuk Pemohon seharusnya Pemohon mendapatkan suara sebanyak 100 suara.

Bahwa peralihan suara Pemohon juga mengalami perubahan di desa Onggobalo di TPS 01, di mana seharusnya Pemohon mendapatkan 50 suara namun tertulis hanya 25 suara, dengan blanko C1 yang ditipex.

Bahwa Pemohon mendapatkan 20 suara di Desa Kindok sehingga suara Pemohon secara keseluruhan adalah 1.030 suara.

##### 4.3. KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 1

6. Bahwa Pemohon atas nama DEMIANUS WENDA dari PDI Perjuangan Caleg DPRD Nomor Urut 4 Dapil I Kabupaten LANNY JAYA, berdasarkan penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik NINAME yang dituangkan dalam DA1-DPRD memperoleh suara bulat sebanyak 5.100 suara dan Partai PSI memperoleh 138 suara dari jumlah pengguna Hak Pilih 5.238, sedangkan untuk suara partai lainnya tidak memperoleh suara.

7. Bahwa Pemohon atas nama DEMIANUS WENDA dari PDI Perjuangan Caleg DPRD Nomor Urut 4 Dapil I Kabupaten LANNY JAYA, berdasarkan penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten LANNY JAYA yang dituangkan dalam DB1-DPRD, suara pemohon mengalami kekurangan suara 1.889 suara sehingga hanya memperoleh suara 3.211 suara.
8. Bahwa suara Pemohon diatas telah dialihkan ke Partai PKPI atas nama ELANUS WONDA sebanyak 1.889 suara, dan atas perubahan tersebut Pemohon telah melaporkan BAWASLU Kabupaten LANNY JAYA yang mengeluarkan BERITA ACARA KLARIFIKASI KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LANNY JAYA TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU tahun 2019, Nomor : 05/BA/BAWASLU/Kab-LJ/33.24/V/2019.3/KPU-Kab/V/2019.
9. Bahwa Pemohon telah melaporkan hal tersebut diatas kepada PPD Distrik NINAME yang kemudian oleh PPD Distrik NINAME mengeluarkan surat nomor : 07/PPD/Dis-NINAME/V/2019 tertanggal 18 Mei 2019 perihal Pengembalian Suara pada hasil Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Ulang di PPD Distrik Niname, akan tetapi tidak dilaksanakan dengan tidak merubah hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten LANNY JAYA yang dituangkan dalam DB1-DPRD oleh KPU Kab. Lanny Jaya.
10. Bahwa jika hasil perolehan suara pemohon di Distrik NINAME Kab. Lanny Jaya di kembalikan kepada Pemohon, maka Partai PDI Perjuangan Dapil 1 Kab. Lanny Jaya akan memperoleh 1 (satu kursi DPRD) atas Nama DEMIANUS WENDA dengan total suara 5.100 suara.

## **T. PROVINSI PAPUA BARAT**

### **5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

#### **5.1. KABUPATEN TAMBRAUW DAPIL 1**

#### **1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI PAPUA BARAT**

##### **1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

##### **3.20.1.1. KABUPATEN TAMBRAUW**

1. Pada 17 april 2019, di tps 01 frafane distrik syujak kab. Tambrau, saya kehilangan 24 suara. Pelaku yang menghilangkan suara adalah caleg partai demokrat (ferdinandus yesnat) dan caleg partai nasdem ( frengky baru).

Lalu waktu pleno di tingkat kabupaten pada 4 mey 2019, saksi parpol : partai demokrat, pdip, gerindra dan golkar mengajukan keberatan dan protes kepada ppd syujak, kpud dan bawaslu dengan meminta agar dibuka kotak suara dan dihitung surat suara ulang di tps 01 frafane. Bawaslu merekomendasikan secara lisan agar dibuka kotak suara dan dihitung surat suara ulang. Kpud tambrauw meniindaklanjuti rekomendasi bawslu tersebut dengan mememintahkan kepada ppd distrik syujak ditemani oleh pihak keamanan pergi ke syujak untuk mengambil kotak suara tps 01 frafane dan membawa ke kantor kpud tambrauw



Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUM/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, untuk pemilihan anggota:
  - 3.1. DPR sepanjang di Daerah Pemilihan:
    1. Sumatera Barat 1;
    2. Papua;
    3. Jawa Tengah 6;
    4. Jawa Barat 7;
    5. Sumatera Selatan 1;
    6. Sulawesi Barat
  - 3.2. DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan:
    1. Sumatera Selatan 9;
    2. Sulawesi Selatan 4;
    3. Papua 5
  - 3.3. DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan:
    1. Kabupaten Simalungun Dapil 5;
    2. Kabupaten Padang Sidempuan Dapil 3;
    3. Kabupaten Dairi Dapil 3;
    4. Kabupaten Samosir Dapil 1;
    5. Kabupaten Bengkalis Dapil 4;
    6. Kabupaten Bengkalis Dapil 5;
    7. Kabupaten Siak Dapil 4;
    8. Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4;
    9. Kabupaten Bintan Dapil 3;
    10. Kota Jambi Dapil 5;
    11. Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1;
    12. Kota Tangerang Selatan Dapil 1;
    13. Kabupaten Bangkalan Dapil 3;
    14. Kabupaten Trenggalek Dapil 1;
    15. Kabupaten Dompu Dapil 3;
    16. Kabupaten Pohuwato Dapil 1;
    17. Kabupaten Toraja Utara Dapil 3;
    18. Kabupaten Sigi Dapil 5;
    19. Kabupaten Donggala Dapil 2;
    20. Kabupaten Buru Dapil 1;
    21. Kabupaten Buru Dapil 2;
    22. Kota Manado Dapil 4;
    23. Kabupaten Konawe;
    24. Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
    25. Kabupaten Membramo Tengah Dapil 4;
    26. Kabupaten Puncak Dapil 3;
    27. Kota Jayapura Dapil 2;
    28. Kota Jayapura Dapil 4;
    29. Kabupaten Manokwari Dapil 3;
    30. Kabupaten Fakfak Dapil 2;
    31. Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2;

### 32. Kabupaten Tambrauow Dapil 3.

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

#### 4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

##### 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

###### 4.1.1.1. KABUPATEN SIMALUNGUN DAPIL 5

1. Menyatakan telah terbukti terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Menyatakan seluruh perolehan suara partai dan caleg sepanjang berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun menjadi tidak sah di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019;
3. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebatas untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019;
4. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi RI dalam persidangan untuk itu;
5. Menetapkan perolehan suara seluruh partai dan caleg berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019 adalah perolehan suara yang sah;
6. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan amar putusan ini.

###### 4.1.1.2. KABUPATEN SAMOSIR DAPIL 1

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS III Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan

###### 4.1.1.3. KABUPATEN PADANG SIDEMPUAN DAPIL 3

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di .....
2. menetapkan suara yang benar ....



#### 4.1.1.4. KABUPATEN DAIRI DAPIL 3

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di .....
2. menetapkan suara yang benar .....

#### 4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI RIAU

##### 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### 4.2.1.1. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DAPIL 4

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di .....
2. menetapkan suara yang benar .....

#### 4.2.1.2. KABUPATEN SIAK DAPIL 4

1. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di:
  - Seluruh TPS 12 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau
  - Seluruh TPS 10 Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau

#### 3.2.1.3 KABUPATEN BENGKALIS DAPIL 4

1. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Mandau

#### 3.2.1.4 KABUPATEN BENGKALIS DAPIL 5

1. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Bathin Solapan

#### 3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

##### 3.3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### 3.3.1.3 KABUPATEN BINTAN DAPIL 3

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....

- 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

### 3.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA BARAT

#### 3.4.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

##### 3.4.1.3 DAPIL SUMATERA BARAT 1

Perolehan suara yang benar di Dapil Sumatera Barat I adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	86.663
12	Partai Amanat Nasional	257.748

### 3.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAMBI

#### 3.5.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

##### 3.5.1.3 KOTA JAMBI DAPIL 5

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

### 3.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### 3.6.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

##### 3.6.1.3 DAPIL SUMATERA SELATAN 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....



- 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

### 3.6.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

#### 3.6.2.3 DAPIL SUMATERA SELATAN 9

Perolehan suara yang benar di Dapil Sumatera Selatan IX adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	63.632
4	Partai Golkar	61.271

### 3.6.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### 3.6.3.1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAPIL 1

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.555

### 3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI BANTEN

#### 3.2.1 KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

##### 3.2.1.3 KOTA TANGERANG SELATAN DAPIL 1

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terbukti terjadi penambahan suara (pengelembungan) yang tidak sah pada perolehan suara partai Gerindra dengan perincian sebagai berikut :
  - 2.1. Kelurahan Cipayung = TPS 12 dan TPS 43, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara;
  - 2.2. Kelurahan Ciputat = TPS 67, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 1 (satu) suara;
  - 2.3. Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 45 (empat puluh lima) suara;

- 2.4. Kelurahan Sawah Baru = TPS 32, TPS 37 dan TPS 51, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) perolehan suaranya sebanyak 8 (delapan) suara, PDI Perjuangan perolehan suaranya berkurang 10 (sepuluh) suara;
- 2.5. Kelurahan Serua = TPS 31 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) perolehan suaranya sebanyak 2 (dua) suara
- 2.6. Kelurahan Serua Indah = TPS 32, Partai Gerindra telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara, PDI Perjuangan telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 22 (dua puluh dua) suara.
3. Menetapkan perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 1 (satu) yang benar adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg Dapil 1 (Kecamatan Ciputat per-kelurahan)							
		Sawah Baru	Serua	Ciputat	Sawah Lama	Serua Indah	Jombang	Cipayung	Total
1	PKB	741	831	714	551	644	1.404	357	5.242
2	Partai Gerindra	1.644	2.763	3.147	2.486	1.412	2.253	4.317	18.022
3	PDI Perjuangan	1.781	3.900	3.499	2.592	1.234	2.825	2.205	18.036
4	Partai Golkar	4.572	4.872	1.618	1.869	1.653	5.123	964	20.671
5	Partai Nasdem	527	860	295	539	999	550	373	4.143
6	Partai Garuda	21	40	69	30	17	35	55	267
7	Berkarya	184	351	127	127	190	205	120	1.304
8	PKS	1.547	3.489	1.217	3.949	1.294	2.361	1.099	14.956
9	Perindo	214	436	191	404	129	344	154	1.872
10	PPP	165	327	378	285	166	256	2.022	3.599
11	PSI	888	1.268	407	706	326	811	440	4.846
12	PAN	519	687	375	338	291	1.369	788	4.367
13	HANURA	1.163	709	639	917	750	2.099	518	6.795
14	Demokrat	807	841	994	2.089	1.456	2.246	1.067	9.500
19	PBB	68	210	107	86	327	74	70	942
20	PKPI	19	46	33	28	19	30	18	193
	Total								

4. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan amar putusan ini,



No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pemohon
3	PDI Perjuangan	22.119
12	Partai Amanat Nasional	6.891

### 3.5.1.4 KABUPATEN TRENGGALEK DAPIL 1

Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Trenggalek 1 adalah sebanyak 21.933 suara dan Partai Amanat Nasional sebanyak 4.382 suara

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pemohon
3	PDI Perjuangan	21.933
12	Partai Amanat Nasional	4.382

## 3.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### 3.6.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### 3.6.1.3 KABUPATEN DOMPU DAPIL 3

1. Menyatakan telah terbukti terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompus dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Menyatakan seluruh perolehan suara partai dan caleg sepanjang berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun menjadi tidak sah di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompus dalam Pemilu Tahun 2019;
3. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebatas untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompus dalam Pemilu Tahun 2019;
4. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompus dalam Pemilu Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi RI dalam persidangan untuk itu;
5. Menetapkan perolehan suara seluruh partai dan caleg berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompus dalam Pemilu Tahun 2019 adalah perolehan suara yang sah;

6. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Dompu untuk melaksanakan amar putusan ini.

### 3.7 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI GORONTALO

#### 3.7.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

##### 3.7.1.3 KABUPATEN POHUWATO DAPIL 1

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato dari Dapil Pohuwato I dalam Formulir DA1-DPRD Kabupaten POHUWATO Sepanjang/Untuk permohonan Daerah Pemilihan DAPIL POHUWATO I Pengisian Kursi DPRD Kabupaten Pohuwato untuk perolehan Partai Golkar Kecamatan Marisa sebesar 4044 suara sah; Kecamatan Patilanggio sebesar 1793 suara sah dan Kecamatan Duhiadaa 1749 suara sah

KECAMATAN MENURUT PEMOHON					SELISIH (TOTAL 1 - TOTAL 2)
MARISA	PATILANGG ION	BUNTULI A	DUHIADA A -	TOTAL 2	
1019	815	1142	726	3702	0
1411	1022	739	2309	5481	0
1916	476	944	1007	4343	0
4044	1793	2529	1749	10115	37
320	71	61	115	567	0
0	0	0	0	0	0
261	121	262	115	759	0
210	78	111	74	473	0
146	268	392	55	861	0
700	605	701	705	2711	0
10	5	2	8	25	0
232	32	50	28	342	0
97	33	92	44	266	0
707	432	167	637	1943	0
47	7	2	20	76	0
0	0	0	0	0	0

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato dari Dapil Pohuwato I dalam Formulir DB1-DPRD Kab/Kota POHUWATO Sepanjang/Untuk permohonan Daerah Pemilihan DAPIL POHUWATO I Pengisian Kursi DPRD Kabupaten Pohuwato UNTUK PEROLEHAN PARTAI GOLKAR 10,115 SUARA SAH.



3.8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI MALUKU

3.8.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.8.1.3 KABUPATEN BURU

3.8.1.3.1 DAPIL BURU 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

3.8.1.3.2 DAPIL BURU 2

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

3.9 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.9.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

3.9.1.3 DAPIL SULAWESI SELATAN 4

Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Iv

No	Parpol	Perolehan Suara
1.	Pdi Perjuangan	24. 772 Suara
2.	Pan	24. 527 Suara

3.9.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

3.9.2.3 KABUPATEN TORAJA UTARA DAPIL 3

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Tondon Siba'ta, Toraja Utara III.

**3.10 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**3.10.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**3.10.1.3 KABUPATEN SIGI DAPIL 5**

3. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 3.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 3.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 3.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
4. menetapkan suara yang benar .....

**3.10.1.4 KABUPATEN DONGGALA DAPIL 2**

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

**3.11 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

**3.11.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**3.11.1.3 KOTA MANADO DAPIL 4**

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pembetulan Rekapitulasi di di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing,, Rekapitulasi di Kecamatan Bunnaken, Tuminting, Bunaken Keplauan, Kota Manado.

**3.12 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Perolehan suara yang benar di Dapil Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

<b>[=====Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	214.365
14	Partai Demokrat	67.734



3.13 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD)  
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

3.13.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD KABUPATEN/KOTA

3.13.1.3 KABUPATEN KONAWE DAPIL 4

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4  
Desa Anggopiu, TPS 1, dan TPS 4 Desa Ameroro, dan TPS 2 Desa Amaroa  
Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Provinsi Sulaewsi Tenggara;

3.14 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD)  
DI PROVINSI PAPUA

3.14.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPR RI

3.14.1.3 DAPIL PAPUA

Menetapkan perolehan suara pemohon pada dapil papua untuk pengisian anggota  
DPR RI sebanyak 575.383

3.14.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD PROVINSI

3.14.2.3 PAPUA DAPIL 5

Memerintahkan agar Termohon melakukan:

- Pemungutan suara ulang di .....
- penghitungan suara ulang di .....
- rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
- menetapkan suara yang benar .....

3.14.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.3.3 KOTA JAYAPURA DAPIL 4

5. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 5.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 5.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 5.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
6. menetapkan suara yang benar .....

3.14.3.4 KOTA JAYAPURA DAPIL 2

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....

- 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

### 3.14.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### 3.14.4.3 KABUPATEN PUNCAK

Perolehan suara yang benar di Dapil Puncak III adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.878

#### 3.14.4.4 KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH DAPIL 4

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

#### 3.14.4.5 KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar ....

### 3.14.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### 3.14.5.3 KABUPATEN TAMBRAUW DAPIL 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....



3.14.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.6.3 KABUPATEN FAKFAK DAPIL 2

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di 30 TPS yang berada pada Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak

3.14.7 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.7.3 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DAPIL 2

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Kaungwam kecamatan Catabouw kabupaten pegunungan arfak Provinsi Papua Barat

3.14.8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.8.3 KABUPATEN MANOKWARI DAPIL 3

3. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 3.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 3.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 3.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di .....
4. menetapkan suara yang benar .....

4 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

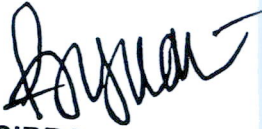
Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON



DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.

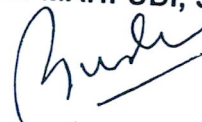
MAGDA WIDJAJANA, S.H.



M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.



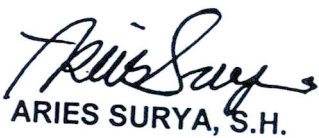
IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.



ARIES SURYA, S.H.

ALVON K. PALMA, S.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H.

DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.

EDISON PANJAITAN, S.H.

SIMEON PETRUS, S.H.

I WAYAN SUDIRTA, S.H.

SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.

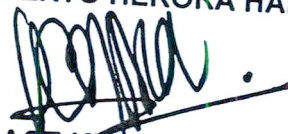


PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



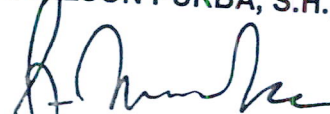
FERNANDY RUSDI, S.H.

BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.

APRILSON PURBA, S.H., M.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

FARIDA HANUM, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

RIDWAN DARMAWAN, S.H.

OCTIANUS, S.H.

W. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

EFRI DONAL SILAEN, S.H.

ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.

MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

MEGAWATY, SH.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.

JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

ANDI WALINGA, SH.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

WAKIT NUROHMAN, S.H., M.

HAKIM YUNIZAR, S.H.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.